

OPTIMALISASI KINERJA KONTRA INTELIJEN DALAM PENGAMANAN RAHASIA NEGARA

Wisnu Utomo*)

Pertahanan negara adalah upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dengan konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas, maka globalisasi yang merambah berbagai aspek kehidupan telah menjadikan ancaman pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa berkembang menjadi multidimensional. Oleh karena itu upaya penanganannya tidak hanya bertumpu pada kemampuan pertahanan berdimensi militer namun juga pertahanan berdimensi nirmiliter (Kirbiantoro, 2007).

Kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh suatu negara dapat dilihat dari bentuk dan pengorganisasian intelijennya (Prihatono, 2009). Dengan keberadaan institusi intelijen, perkembangan setiap wilayah bisa diketahui dan dianalisis untuk diolah dan dijadikan data ketahanan wilayah. Intelijen sebagai mata dan telinga negara memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas dan mendeteksi suatu ancaman sedini mungkin.

Kemampuan intelijen dan

kontra intelijen merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan kemampuan intelijen tidak lengkap tanpa kekuatan kemampuan kontra intelijen, sebaliknya kemampuan kontra intelijen yang kuat tidak bisa dibangun tanpa pengembangan kemampuan intelijen yang mumpuni.

Dalam pengamanan rahasia negara, kewaspadaan terhadap operasi intelijen lawan menjadi suatu hal yang penting dikarenakan dalam melaksanakan pen-

*) Alumnus S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

gumpulan informasi intelijen tersebut aktor intelijen lawan dapat mengancam keamanan suatu target dengan mengeksploitasi kelemahan. Ditemukannya alat menyadap di beberapa Kedutaan Besar RI di luar negeri (Media Indonesia, 2004) serta bocornya surat rahasia dari sebuah pabrik kapal di Belanda yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan RI pada Desember 2006 (Kompas, 2006) menunjukkan masih lemahnya kontra intelijen Indonesia. Selain itu, berbagai aksi ancaman bom dan penyadapan atas rahasia negara merupakan indikasi masih rendahnya kinerja kontra intelijen.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman intelijen telah dilakukan namun demikian beberapa kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kinerja intelijen dan kontra intelijen belum optimal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikenali suatu permasalahan mendasar pada pembangunan kontra intelijen dalam pengamanan rahasia negara. Sebagai upaya meningkatkan kinerja kontra intelijen dalam pengamanan rahasia negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wila-

yah Negara Kesatuan RI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, maka permasalahan mendasar yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tantangan dan perkembangan pembangunan intelijen di Indonesia? (2) Bagaimana pelaksanaan pembangunan kontra intelijen di Indonesia? (3) Bagaimana strategi yang perlu ditempuh dalam meningkatkan kinerja kontra intelijen?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan: (1) Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan perkembangan pembangunan intelijen di Indonesia. (2) Mengetahui pelaksanaan pembangunan kontra intelijen di Indonesia. (3) Merumuskan strategi kebijakan optimalisasi kontra intelijen.

Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, dan Metode Penelitian

Tinjauan Pustaka

Globalisasi membawa arus teknologi informasi, industrialisasi, dan proses demokratisasi yang berdampak pada perubahan kehidupan manusia. Persepsi tentang ancaman yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara berbeda-beda, baik ancaman konvensional maupun non kon-

vensional. Sejak berakhirnya Perang Dingin, ancaman non-konvensional lebih mengemuka dibandingkan dengan ancaman militer konvensional, oleh karenanya informasi intelijen menjadi lebih *powerfull* dibandingkan dengan persenjataan (Bhakti, 2005).

Kegiatan intelijen pada intinya adalah *early detection* yaitu peringatan dini terhadap sesuatu hal yang membahayakan. Sebagai sebuah kegiatan, intelijen melibatkan pengumpulan dan analisis informasi, serta upaya-upaya untuk menangkalkan kegiatan-kegiatan dari intelijen lawan. Menurut Saronto (2004), kegiatan intelijen dikategorikan ke dalam 4 (empat) type, yaitu pengumpulan informasi (*collection*), analisa informasi (*analysis*), operasi intelijen (*covert operation*), dan kontra intelijen (*counter intelligence*). Kesemuanya dilakukan untuk memperkuat sistem peringatan dini (*early warning system*) keamanan nasional.

Kontra intelijen adalah aktivitas dan informasi yang diadakan dengan tujuan melindungi rakyat dan pemerintah dari spionase dan aktivitas intelijen lain, sabotase, atau pembunuhan oleh dinas intelijen negara lain atau unsur-unsur asing lainnya. Kontra intelijen bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap intelijen lawan dan kemampuan

analisisnya. Hal ini dilakukan melalui operasi-operasi desepsi yang memberikan informasi palsu atau *misleading* untuk membuat lawan memperoleh kesimpulan yang salah mengenai kapabilitas, tindakan ataupun maksud dari intelijen kita (Barger, 2005).

Salah satu unsur dalam intelijen adalah kerahasiaan. Informasi sebagai komoditas yang dianggap penting senantiasa menjadi sasaran dan diperebutkan, terlebih lagi jika informasi tersebut merupakan rahasia negara. Oleh karena itu, hal-hal khusus yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional perlu penanganan pengamanan yang serius dan komprehensif. Desakan untuk memperbaiki kinerja intelijen telah digulirkan oleh berbagai pihak. Namun demikian, mengingat bahwa komunitas intelijen Indonesia cukup heterogen dan selama ini dikenal lemah dalam koordinasi, sehingga dorongan peningkatan peran pada suatu badan intelijen tertentu dapat dilihat sebagai pengurangan peran serta perhatian pada lembaga yang lain (Wirawan, 2005).

Memperhatikan berbagai hal di atas serta dihadapkan pada ancaman nasional yang senantiasa semakin kompleks, maka diperlukan kinerja intelijen dan

kontra intelijen yang mumpuni. Optimalisasi terhadap kemampuan sumber daya yang dimiliki akan meningkatkan kualitas kinerja intelijen dan kontra intelijen sehingga pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional.

Landasan Teori

Dasar teoritis tentang kinerja. Teori kinerja yang dikembangkan oleh McCloy, Cambell, dan Cuedek dalam Rosyadi (2010:117) menyebutkan bahwa kinerja ditentukan oleh sejumlah faktor berikut:

$$\text{Kinerja} = f(P, Kh, K, M),$$

Keterangan :

P : pengetahuan mengenai fakta, aturan, prinsip, dan prosedur

Kh: keahlian (*skill*) untuk melaksanakan pekerjaan

K : kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan pekerjaan

M : motivasi

Model persamaan di atas menunjukkan bahwa kinerja bergantung pada perpaduan faktor personal, yaitu pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan motivasi.

Dasar teoritis tentang optimalisasi. Metode optimalisasi dalam hubungan matematik biasanya menyangkut pengertian memaksimalkan atau meminimalkan (Gill, 1993:261-263). Di-

meni atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai optimalitas kinerja. Miner (1988) mengemukakan 4 (empat) dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja, yaitu: (1) kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kecermatan; (2) kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan; (3) penggunaan waktu, yaitu efektivitas kerja; (4) dan kerjasama. Dalam konteks intelijen, kualitas ditunjukkan oleh tingkat akurasi informasi intelijen yang dihasilkan, kuantitas ditunjukkan oleh jumlah informasi yang berhasil diperoleh atau diamankan, penggunaan waktu ditunjukkan oleh ketepatan dalam pemanfaatan waktu yang tersedia, dan kerjasama ditunjukkan oleh sinergitas antarinstansi intelijen.

Ketiga, dasar teoritis tentang intelijen. Kata intelijen (*intelligence*:Inggris) berasal dari bahasa Latin *intellectus* yang berarti *perception* (penglihatan, daya tanggap, memahami). Teori intelijen dasar pertama diintroduksi oleh Sun Tsu, seorang ahli strategi dan perang dari daratan Cina yang hidup 500 SM, yang meletakkan dasar-dasar ilmu intelijen dalam falsafah perang di Cina saat itu. Sun Tzu menekankan pentingnya pengetahuan dan informasi. Dalam hal ini Sun Tsu mengajarkan, "ketahuilah

musuhmu, pahamiilah dirimu, maka kemenangan akan menjemputmu di ratusan medan laga” (Anggoro, 2005: 144).

Keempat, dasar teoritis tentang kontra intelijen. Kontra intelijen merupakan suatu usaha nasional untuk mencegah badan intelijen asing dan gerakan politik yang dikendalikan kekuatan serta kelompok asing agar tidak melakukan infiltrasi ke dalam lembaga negara. Oleh karena itu dapat dikatakan, kontra intelijen adalah bagian integral dari keseluruhan proses intelijen (Saronito, 2004:156).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu melakukan deskripsi dan interpretasi terhadap data, informasi, serta memberikan gambaran secara komprehensif dan menyeluruh tentang situasi dan perkembangan lingkungan strategis yang menjadi obyek penelitian. Secara kualitatif, bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang obyektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu dan berhubungan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya metoda komparasi dilakukan untuk menganalisa parameter yang bersifat terukur.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di

tiga institusi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi intelijen, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), serta Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian dikumpulkan secara selektif dari bahan kepustakaan dalam bentuk buku dan jurnal. Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi pemerintah yang terkait dengan bidang pertahanan, intelijen dan kontra intelijen, serta keuangan negara. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pejabat dan pelaku intelijen dan kontra intelijen.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan komparatif melalui studi kepustakaan dari berbagai referensi serta wawancara nara sumber dengan pendekatan fungsi secara komprehensif dan integral. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis sejarah, latar belakang, serta kondisi intelijen dan kontra intelijen yang berkaitan dengan perannya sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan khususnya dalam pengamanan rahasianya negara. Adapun pendekatan ko-

mprehensif integral dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi upaya optimalisasi kinerja kontra intelijen dihadapkan pada persepsi ancaman nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional.

Pembangunan Intelijen Indonesia

Pembangunan adalah usaha untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Siagian (1990) mengungkapkan bahwa pembangunan merupakan perubahan berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa menuju modernitas. Adapun pembangunan intelijen sebagai bagian dari pembangunan pertahanan merupakan suatu upaya meningkatkan profesionalitas intelijen untuk lebih peka, tajam dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan intelijen yang profesional diperlukan pemahaman terhadap landasan pembangunan dan perkembangan intelijen Indonesia.

Landasan Pembangunan Intelijen Indonesia

Landasan intelijen Indonesia

terdiri dari landasan idiil, landasan konstitusional, landasan visional, landasan konsepsional, landasan sejarah dan budaya, landasan aspirasi masyarakat, dan landasan operasional.

Pancasila merupakan landasan idiil yang menjiwai perumusan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila juga merupakan landasan idiil bagi intelijen negara Republik Indonesia. Landasan konstitusional intelijen Indonesia adalah Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran tentang pembinaan dan penyelenggaraan intelijen negara yang dijiwai dan dilandasi oleh falsafah Pancasila, isi hakikinya tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Wawasan Nusantara sebagai wawasan visional bangsa. Visi intelijen adalah menjadi intelijen yang profesional di dalam dirinya, serta profesional di dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi intelijen yang mendukung dan mengamankan serta ikut mensukseskan kebijakan dan strategi nasional melalui pengembangan sistem intelijen negara yang modern, kepemimpinan yang profesional, kehandalan personil, sarana prasarana intelijen terkini, serta di-

payungi oleh undang-undang intelijen negara.

Ketahanan nasional merupakan landasan konseptual bangsa Indonesia. Ketahanan nasional adalah konsep kelangsungan hidup bangsa dan negara yang dituangkan dalam pembangunan nasional, sekaligus sebagai geostrategi bangsa Indonesia. Dalam perjuangan bangsa Indonesia terungkap kandungan nilai-nilai hakiki perjuangan. Nilai-nilai dasar budaya tersebut tetap terpatri dalam sistem penyelenggaraan dan pembinaan intelijen Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang. Tuntutan aspirasi masyarakat untuk perubahan sejak gerakan reformasi nasional telah menjadikan visi dan misi intelijen perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Pada akhirnya, undang-undang intelijen negara akan menjamin serta merupakan landasan bagi semua aktivitas intelijen, agar berjalan lebih efektif, efisien, terkoordinir, berhasil guna, bersinergi dalam mendukung visi dan misi intelijen negara.

Perkembangan Intelijen Indonesia

Dengan merujuk pengalaman beberapa negara modern di Eropa, Richardson (1995) menyimpulkan bahwa secara historis terdapat tiga pola kehadiran intelijen, yaitu (1) intelijen yang

lahir dari institusi militer; (2) intelijen yang lahir dari polisi; serta (3) intelijen yang lahir dari kegiatan diplomasi.

Perkembangan lembaga intelijen Indonesia dapat dibagi dalam tiga periode penting, yaitu periode intelijen perjuangan, periode intelijen pembangunan, serta periode intelijen reformasi. Periode intelijen perjuangan terjadi di masa-masa perang revolusi kemerdekaan dan beberapa saat setelah kekuatan kolonial meninggalkan Indonesia; periode intelijen pembangunan berawal dari pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 1967 ketika Jenderal Soeharto mengambil alih pemerintahan melalui sidang khusus MPRS; dan periode intelijen reformasi dimulai sejak runtuhnya Orde Baru.

Pelaksanaan Kontra Intelijen Indonesia

Kegiatan kontra intelijen Indonesia telah ada sejak lahirnya intelijen di Indonesia. Namun, pembangunan kontra intelijen yang terkait dengan pengamanan rahasia negara, utamanya dalam pengamanan terhadap ancaman penyadapan pihak lawan mulai digiatkan sejak terjadinya kebocoran pembicaraan antara Presiden RI dengan Jaksa Agung RI pada tahun 1998. Kasus tersebut menyadarkan adanya ancaman penyadapan/ke-

bocoran terhadap informasi rahasia negara.

Kontra intelijen dalam pengamanan rahasia negara tercantum pada Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai, khususnya pada 2 (dua) program, yaitu : (1) Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara yang dilaksanakan melalui kegiatan operasi kontra intelijen; dan (2) Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara yang utamanya dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan jaringan komunikasi sandi.

Kontra intelijen dalam pengamanan rahasia negara pada intinya dilakukan melalui kegiatan operasi kontra intelijen, pembangunan dan pengembangan sistem persandian, pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia persandian, pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi persandian, serta ketersediaan anggaran dan peralatan intelijen berteknologi tinggi.

Pembangunan dan pengembangan sistem persandian. Dalam rangka mendukung modernisasi peralatan sandi dan perkembangan teknologi informasi, maka dilakukan berbagai metode dan cara untuk mengamankan komunikasi rahasia negara, di antaranya dengan merancang dan mengaplikasikan *fully na-*

tional algorithm pada seluruh peralatan komunikasi sandi yang digunakan dalam pengolahan informasi rahasia sehingga rahasia negara tersebut dapat terjamin kerahasiaannya.

Pembangunan dan pengembangan SDM. Keberhasilan intelijen perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pada saat ini sumber daya manusia Badan Intelijen Negara masih didominasi oleh sumber daya manusia yang berpendidikan tingkat Strata 1 yaitu sebesar 49 persen dan SLTA sebesar 40 persen. Begitu pula, struktur pendidikan sumber daya manusia Lemsaneg RI didominasi oleh sumber daya manusia yang berpendidikan tingkat Strata 1 sebesar 29 persen, Diploma 3 sebesar 14 persen, dan SLTA sebesar 47 persen.

Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi sandi. Upaya mencegah terjadinya penyadapan terhadap pengiriman berita rahasia negara ditempuh dengan penyusunan sistem persandian nasional (SIS-DINA) dan implementasinya diwujudkan dengan gelar Jaring Komunikasi Sandi Nasional yang terdiri dari: (1) Jaring komunikasi sandi VVIP, yaitu pengamanan komunikasi antara Presiden/ Wakil Presiden dengan para Menteri dan pejabat pimpinan instansi pemerintah serta lemb-

ga tinggi negara lainnya, (2) Jaringan komunikasi sandi intern instansi, yaitu pengamanan komunikasi internal suatu instansi, (3) Jaringan komunikasi sandi antar-instansi, yaitu pengamanan komunikasi lintas sektor atau antar kementerian/lembaga, (4) Jaringan komunikasi sandi khusus, yaitu pengamanan komunikasi pada kegiatan khusus misalnya pengamanan kegiatan kunjungan Presiden/Wakil Presiden ke luar negeri dan penanganan daerah bergejolak.

Peningkatan Teknologi Peralatan Kontra Intelijen Indonesia. Pembangunan jaringan komunikasi sandi dalam kontra intelijen didukung dengan pengadaan peralatan *cryptomach*, *cryptoshield*, *GSM jammer*, *inmarsat*, peralatan *counter surveillance*, peralatan *surveillance*, *cryptosoft*, *radio cryptocodan*, *omnisec*, dan *mills cryptosystem*.

Alokasi Anggaran. Indonesia termasuk negara yang mengalokasikan anggaran pertahanan dan keamanan dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Rendahnya alokasi anggaran untuk kegiatan kontra intelijen, khususnya pengamanan rahasia negara, disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan keuangan negara yang dialokasikan pada sektor pertahanan dan keamanan untuk kegiatan pembangunan.

Strategi Optimalisasi Kinerja Kontra Intelijen Indonesia

Intelijen memainkan peran penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Optimalisasi kinerja intelijen dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap negara, baik negara kawan maupun lawan memiliki dan memerlukan intelijen negara sasaran. Oleh karena itu suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari setiap kegiatan intelijen adalah kontra intelijen.

Optimalisasi Intelijen Indonesia

Optimalisasi intelijen dapat dilihat dari fungsi dan proses intelijen, serta peran intelijen dalam perumusan kebijakan (Widjajanto, 2005).

Optimalisasi fungsi intelijen. Fungsi pokok intelijen adalah penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Upaya optimalisasi fungsi intelijen dapat ditempuh dengan mensinergikan ketiga fungsi intelijen tersebut. Dengan terbangunnya sinergitas antarfungsi intelijen diharapkan kegiatan atau operasi intelijen akan menghasilkan keluaran intelijen yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

Optimalisasi proses intelijen. Proses intelijen terdiri dari fase pengumpulan, analisis, pengolahan, dan penyebaran. Opti-

malisasi fungsi dan proses intelijen ditujukan untuk mencapai tujuan nasional, dimana seluruh kegiatan intelijen ditujukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan nasional sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Optimalisasi peran intelijen dalam perumusan kebijakan. Intelijen melaksanakan peran dan misinya sesuai dengan tugas pokoknya, yaitu menyediakan bahan keterangan, menganalisa dan membuat perkiraan keadaan. Optimalisasi diupayakan melalui penyediaan intelijen yang akurat, lengkap dan tepat waktu untuk disampaikan kepada pengguna, dalam hal ini pimpinan nasional sebagai salah satu masukan bagi proses merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Optimalisasi Fungsi Kontra Intelijen

Fungsi kontra intelijen berkaitan dengan kepentingan melindungi negara maupun badan intelijen dari kegiatan badan intelijen asing, subversi, sabotase, terorisme, dan separatisme. Keberhasilan tugas kontra intelijen perlu didukung oleh komunitas intelijen. Dalam upaya optimalisasi, maka kontra intelijen semestinya bukan dilihat sebagai mencampuri fungsi lainnya, na-

mun sebagai bagian integral dari proses intelijen.

Optimalisasi Sumber Daya Kontra Intelijen Indonesia

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam melaksanakan fungsi peringatan dini (*early warning*) dengan memasok informasi terbaru dan akurat untuk menghindarkan kejutan-kejutan strategis (*strategic surprises*), maka organisasi intelijen harus memiliki payung hukum, optimalisasi SDM, optimalisasi pendanaan, disertai dengan koordinasi dan kerja sama yang erat dari seluruh komunitas intelijen negara.

Penguatan payung hukum. Terbitnya undang-undang intelijen negara RI merupakan kebutuhan yang mendesak. Undang-undang intelijen tersebut diharapkan dapat mengatur tentang visi dan misi intelijen negara, yaitu terwujudnya institusi intelijen negara yang tangguh, modern, dinamis dan berwawasan masa depan, mendukung dan mengamankan, serta menyukseskan kebijakan dan strategi dalam pencapaian kepentingan nasional dan keamanan nasional. Undang-undang tersebut tentunya akan menjadi landasan pelaksanaan tugas dan kewenangan, sehingga intelijen negara tidak ragu-ragu dalam

melaksanakan koordinasi terhadap para pengemban utama fungsi intelijen dan pengemban pendukung fungsi intelijen dalam menyediakan intelijen yang obyektif, akurat, dan tepat waktu.

Optimalisasi SDM kontra intelijen. Adanya keterbatasan sumber daya manusia dihadapkan dengan berbagai hambatan yang muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka strategi yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan secara maksimal dimensi *human intelligence* yang operasionalisasinya dapat dilakukan dengan berbagai taktik. Taktik tersebut diantaranya: (1) menyusupkan agen-agen intelijen negara ke dalam sel-sel intelijen asing, (2) mewaspadai adanya/masuknya agen-agen asing/lawan yang berpura-pura bekerja bagi intelijen negara, atau (3) mencari informasi terhadap orang-orang yang memahami negara atau organisasi lawan.

Optimalisasi pendanaan kontra intelijen. Pelaksanaan kegiatan kontra intelijen memerlukan dukungan ketersediaan dana yang cukup. Bagi negara-negara yang tidak memiliki sumber pendanaan yang cukup, maka optimalisasi pemanfaatan pendanaan yang tersedia dapat dilakukan dengan strategi pe-

ntuan fokus prioritas sasaran: (1) Memprioritaskan pada kejutan-kejutan strategis yang kemungkinan terjadinya kecil (*low probability*) namun dengan daya destruksi yang besar (*high destruction*); atau (2) Memprioritaskan pada kejutan-kejutan strategis yang kemungkinan terjadinya besar (*high probability*) namun dengan daya destruksi yang terbatas (*low destruction*). Indonesia sebagai negara yang memiliki keterbatasan ketersediaan pendanaan serta sedang dalam tahapan awal konsolidasi demokrasi, pilihan yang paling realistis adalah pilihan pertama.

Optimalisasi koordinasi dan kerja sama intelijen. Pengembangan kapasitas kelembagaan intelijen ditempuh melalui optimalisasi koordinasi dan kerja sama seluruh komunitas intelijen. Terbangunnya koordinasi dan kerja sama intelijen akan meminimalkan permasalahan signal dan meminimalkan kesenjangan yang sering terjadi antara informasi yang disampaikan oleh komunitas dengan tanggapan kebijakan yang diputuskan oleh pemegang otoritas politik.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya pergeseran hakikat ancaman. Hal ini berpengaruh terhadap keberadaan

intelijen suatu negara. Perkembangan intelijen di Indonesia dapat dibagi dalam tiga periode, yaitu periode intelijen perjuangan, periode intelijen pembangunan, serta periode intelijen reformasi.

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kontra intelijen dilakukan melalui operasi kontra intelijen yang didukung dengan pembangunan dan pengembangan sistem persandian, pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia persandian, serta pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi persandian.

Upaya peningkatan kinerja kontra intelijen dapat ditempuh melalui: (a) optimalisasi fungsi, proses, dan peran intelijen dalam perumusan kebijakan; (b) Optimalisasi fungsi kontra intelijen; dan (c) optimalisasi sumber daya kontra intelijen yang meliputi: penguatan payung hukum, optimalisasi SDM, optimalisasi pendanaan, serta optimalisasi koordinasi dan kerja sama komunitas intelijen.

Saran

Perlu dikaji lebih lanjut mengenai pembagian wewenang dan mekanisme kewajiban berkoordinasi dalam melaksanakan tugas intelijen dan kontra-intelijen. Peran koordinasi tidak perlu melekat pada suatu orga-

nisasi yang merangkap sebagai anggota tanpa kepastian dasar hukum yang jelas seperti posisi BIN pada saat ini. Model koordinasi seperti ODNI (*Office of Director National Intelligence*) di AS dapat dijadikan sebagai salah satu contoh koordinasi intelijen dan kontra intelijen.

Penguasaan teknologi persandian yang diawali dengan tahap modifikasi dan perbaikan teknologi yang telah dibangun di Lembaga Sandi Negara perlu dilanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya. Dalam pengembangannya dapat ditempuh dengan: (a) mencukupi pendanaan pemerintah untuk penelitian dan pengembangan teknologi intelijen, (b) mempercepat aplikasi penelitian, (c) memperbaiki pengenalan teknologi kepada publik.

Daftar Pustaka

- Anggoro, K., 2005, *Konsolidasi Negara, Politik Transisi, dan Fungsi Intelijen*, Pacivis UI dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.
- Barger, D.G., 2005, *Toward a Revolution in Intelligence Affairs*, RAND, Santa Monica.
- Bhakti, I.N., 2005, *Intelijen dan Keamanan Negara*, Pacivis UI dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.

- Gill, P.E., Murray W. and Wright M.H., 1993, *Practical Optimization*, Academic Press Inc, London.
- Kirbiantoro, H.S. dan Rudianto D., 2007, *Rekonstruksi Pertahanan Indonesia: Potensi, Tantangan dan Prospek*, Inti Media Publisher, Jakarta.
- Miner, J., 1988, *Organizational Behavior, Performance and Productivity*, Random House Business Division, New York.
- Prihatono, T.H., Kusnanto A., Cornelis L., *Rekomendasi Kebijakan tentang Kerangka Kerja Keamanan Nasional 2009 – 2014*, ProPatria Institute, Jakarta. [http://www.propatria.or.id/load-down/Naskah% 20Akademik/final_rekomendasi%20kebijakan_2009% 20new.pdf](http://www.propatria.or.id/load-down/Naskah%20Akademik/final_rekomendasi%20kebijakan_2009%20new.pdf)
- Richardson and Jeffrey T., 1995, *A Century of Spies Intelligence in The Twentieth Century*, Oxford University Press, New York.
- Rosyadi, S., 2010, *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Saronto, Y.W., Jasir K., Victor H., Hadi S., Dadang I., 2004, *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, PT Ekalaya Saputra, Jakarta.
- Siagian, S.P., 1990, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Widjajanto, A., 2005, *Reformasi Intelijen Negara*, Pacivis UI dan FES, Jakarta.
- Wirawan, H., 2005, *Reformasi Intelijen Indonesia*, Pacivis UI dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.